GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : MEDIA INDONESIA **Tgl/Bln/Thn : 9/12/2004**

Subyek : **Hari : KAMIS**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Penegakan Hukum Pencemar Lingkungan Harus Objektif

JAKARTA (Media): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan harus dilakukan, tetapi harus objektif dan sesuai ketentuan.

Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, usai menghadap Presiden di Istana Negara, kemarin. Permintaan Presiden itu terkait dengan proses hukum terhadap PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang dituding telah mencemarkan Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan itu, lanjut Rachmat, dilaporkan juga bahwa berkas perkara untuk menggugat PT NMR telah disiapkan dan dalam waktu satu-dua pekan mendatang sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan, sehingga diharapkan proses persidangannya dapat dimulai awal Januari 2005.

"Saya mendapat pesan dari Presiden bahwa gugatan itu perlu dilakukan, karena kita perlu menegakkan undang-undang (UU) yang menjaga lingkungan hidup kita. UU negara kita tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk investor," paparnya.

Namun, lanjutnya, di pihak lain, pemerintah harus bersikap objektif terhadap perkembangan yang ada, sehingga tidak serta-merta menghukum atau mencabut izin operasi sebuah perusahaan. "Justru lewat proses peradilan objektivitas itu dapat diketahui bahwa yang bersangkutan memang melanggar hukum."

Rachmat menjamin para investor yang mematuhi peraturan akan terlindungi. Demikian juga dengan masyarakat di sekitar perusahaan itu juga akan terlindung dari dampak pencemaran lingkungan.

Pemerintah, katanya, tidak khawatir sikap tegas pemerintah nantinya akan berakibat hengkangnya para investor. Sebab, hengkangnya para investor pencemar lingkungan akan segera digantikan oleh investor baru yang jujur.

"Jadi, kalau ada yang mencemarkan lingkungan, ya kita hukum, dong. Menurut saya, tindakan ini justru meningkatkan investasi. Kalau kemudian ada yang hengkang, ya terserahlah. Jangan rakyat kita yang dikorbankan," katanya lagi.

Pada bagian lain penjelasannya, disebutkan pula KLH pekan ini akan menerbitkan klasifikasi tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, dengan kategori ramah lingkungan, biasa, kurang baik, dan tidak baik. Dari 261 perusahaan yang dinilai, ada 43 perusahaan yang berkategori kurang dan tidak baik, "Dan mereka patut diberi teguran," tandasnya.

Sementara itu, di kantornya hal senada juga dikatakan Rachmat ketika menerima kedatangan lima warga Buyat Pantai, Ratatotok, Minahasa Selatan, Sulut, kemarin. Menurut Menteri LH, siapa pun yang terlibat dalam kasus pencemaran Teluk Buyat akan diproses secara hukum. Namun, untuk menentukan pihak mana yang terlibat dalam pencemaran, harus melalui proses pengadilan.

Lima warga itu didampingi para aktivis dari lembaga swadaya masyarakat Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), Komnas Perempuan, Yayasan Kelola dan BKMT (Badan Koordinasi Masyarakat Tambang) dan Yayasan Suara Nurani.

Sementara itu, Siti Maimunah, Koordinator Nasional Jatam menjelaskan tentang kondisi masyarakat Pantai Buyat. Bahkan, berdasarkan laporan dokter dari sebuah LSM, terdapat 182 orang warga Buyat menderita berbagai penyakit. Tercatat 41 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 31 mengalami gangguan neurologis, 34 menderita benjol-benjol (lifoma), 24 tuberkolusis (Tb) dan 14 menderita sakit kulit.

Sedangkan wakil masyarakat Buyat, Mansyur Lambunaung mendesak Menteri LH untuk segera menyelesaikan masalah Teluk Buyat yang telah dinyatakan tercemar.

Anwar Setirman yang juga warga Buyat, menyampaikan tentang adanya intimidasi dari pihak pemda terhadap warga Buyat. Pejabat pemda setempat menilai masyarakat Buyat sebagai orang malas dan miskin yang ingin mencari kekayaan. "Bahkan kami dibilang berpura-pura sakit," katanya.

Padahal, kata Anwar, sebelum Teluk Buyat tercemar penghasilan nelayan cukup banyak. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dan bahkan bisa menabung. "Tetapi sekarang ikan tidak lagi bisa dikonsumsi dan saya meminta Pak Menteri untuk melakukan tindakan nyata kalau Teluk Buyat memang tercemar," katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP